

PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Syahrul

Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta
syahrul.stain@gmail.com

Edy Karno

Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta,
edykarno72@gmail.com

Abstract

Quality education is a mandate of the Constitution of 1945 and Law No. 20 Year 2003 on National Education System. But in practice can not be perceived by the public as a whole . With regional autonomy, the actual open space to innovate for better quality education. One of the areas that are the object of observation is Buton in Southeast Sulawesi Province .

This research found that : *First* , the quality of education condition in Buton from kindergarten, elementary, junior high to high school is still low, so the need to reform the education quality national standards compliant. *Second* , the National Education Standards Achievement Eight (SNP) in Buton can be viewed from: a) the lack of competence of the aspect of student content standards; b) the low standard of the learning process of the school; c) In the aspect of quality facilities and infrastructure in the sample schools in Buton is still very low; d) In the standard aspects of management not meet the standards provide educational services to the fullest; e) In the standard aspects of school funding turns all samples although the criteria scores above 60; f) Quality of graduate schools in Buton are sampled at graduation criteria sufficient; g) In the aspect of education personnel standards and education personnel value obtained was below 60; h) In general, the sample schools did not provide information on the assessment criteria syllabus presented to students at the beginning of the semester. *Third*, the priority development agenda of the quality of education in Buton implemented in four, namely Phase I, II, III , and IV, which includes floating at all levels of education, including non-formal education at all of the District, given the level of urgency.

Keywords : Quality, National Standards of Education, Schools, Regional Autonomy

Abstrak

Pendidikan bermutu merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi dalam prakteknya belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Dengan otonomi daerah, sesungguhnya terbuka ruang untuk melakukan inovasi bagi pendidikan yang lebih bermutu. Salah satu daerah yang menjadi objek amatan adalah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara.

Riset ini menemukan bahwa: *Pertama*, Kondisi mutu pendidikan di Kabupaten Buton dari tingkat TK, SD, SLTP hingga SLTA masih rendah, sehingga perlu pembenahan sesuai standar mutu pendidikan nasional. *Kedua*, Ketercapaian Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten Buton dapat dilihat dari: a) rendahnya kompetensi siswa; b) rendahnya standar proses pembelajaran; c) Pada aspek mutu sarana dan prasarana masih sangat rendah; d) Pada aspek standar pengelolaan belum memenuhi standar pelayanan pendidikan; e) Pada aspek standar pembiayaan mendapatkan nilai di atas 60; f) Mutu lulusan berada pada kriteria kelulusan cukup; g) Pada aspek standar tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan nilai yang diperoleh masih di bawah 60; h) Pada umumnya sekolah-sekolah sampel tidak menyediakan informasi kriteria penilaian pada silabus yang disampaikan kepada siswa di awal semester. *Ketiga*, Agenda prioritas pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Buton dilaksanakan dalam empat tahap, yakni tahap I, II, III, dan IV, yang mencakup pengembangan pada semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan non-formal pada semua Kecamatan, dengan melihat tingkat urgensinya.

Kata Kunci: Mutu, Standar Nasional Pendidikan, Sekolah, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor strategis dalam pembangunan bangsa, yang mana sangat disadari oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*), sehingga menjadi salah satu point penting dalam pembukaan UUD 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan demikian menjadi tugas Negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang menjamin terciptanya kehidupan bangsa yang cerdas. Hal ini linier dalam bagian pertimbangan point c UU Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan “bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”. Salah satu yang penting digaris bawahi adalah peningkatan mutu pendidikan, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, yang terdiri dari pulau-pulau, tentu menimbulkan kendala tersendiri dalam implementasi Undang-Undang di atas. Akan tetapi otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah dalam mengembangkan pendidikan yang relevan dengan Undang-Undang tersebut. Salah satu daerah yang menarik untuk diamati dalam konteks ini adalah Kabupaten Buton yang berada di wilayah kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data pada Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara (2011) tentang PAJ (Perbandingan Siswa Antara Jenjang Pendidikan) yang merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa “secara umum PAJ menggambarkan bahwa siswa SD/MI di kabupaten Buton sebagian besar tidak melalui TK/RA. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu TK/RA bukan merupakan target Wajib Diknas dan lulus TK/RA tidak menjadi persyaratan untuk masuk ke SD/MI. Untuk kasus perbandingan SD/MI dengan SLTP dan SLTP dengan SLTA yang mencapai angka di atas 100% menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan jumlah siswa yang cukup tinggi antara jenjang pendidikan yang lebih rendah dengan jenjang yang lebih tinggi. Penyebabnya antara lain adalah alasan ekonomi karena semakin tinggi jenjang pendidikan akan membutuhkan biaya yang semakin tinggi pula, atau karena preferensi usia sekolah untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi semakin menurun, dan/atau karena melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

Fakta berikutnya adalah rasio siswa per sekolah yang merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan rata-rata kepadatan siswa setiap sekolah di Kabupaten Buton. Rasio siswa per sekolah untuk TK/RA yang tertinggi adalah kecamatan Mawasangka Tengah yaitu sebesar 215 siswa per sekolah, sedangkan yang terendah adalah kecamatan Batu Atas sebesar 15 siswa per sekolah. Untuk jenjang pendidikan SD/MI

rasio siswa per sekolah yang tertinggi adalah kecamatan Batu Atas sebesar 400 siswa per sekolah, dan yang terendah adalah kecamatan Mawasangka Timur sebesar 102 siswa per sekolah. Selanjutnya, untuk tingkat SLTP rasio siswa per sekolah yang tertinggi adalah kecamatan Batu Atas sebesar 350 siswa per sekolah, dan yang terendah adalah kecamatan Lasalimu sebesar 97 siswa per sekolah. Kemudian pada tingkat SLTA, rasio siswa per sekolah yang tertinggi adalah kecamatan Sampolawa sebesar 506 siswa per sekolah, dan yang terendah adalah kecamatan Batu Atas sejumlah 66 siswa (Sumber: Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011).

Kondisi berikutnya adalah APK maupun APM yang menunjukkan Angka partisipasi warga masyarakat Kabupaten Buton terhadap lembaga pendidikan formal, diketahui bahwa “pada jenjang TK/RA akses terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tergolong masih sangat terbatas dan sangat rendah yakni APK sebesar 65,06% dan APM sebesar 53,13%. Sedangkan jenjang SD/MI, angka partisipasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs baik APK maupun APM tergolong cukup. Pada jenjang SLTA tampaknya dapat dikategorikan cukup untuk APK namun APM masih rendah. Jika ditinjau pada masing-masing kecamatan tampak bahwa nilai APK maupun APM tertinggi untuk untuk semua jenjang pendidikan adalah kecamatan Pasar Wajo. Kemudian nilai APK terendah untuk jenjang SLTA adalah yang terendah adalah kecamatan Kapontori, sedangkan untuk APM terendah adalah kecamatan Lasalimu Selatan. Untuk jenjang SLTP/MTs dengan APK terendah adalah kecamatan Batu Atas, sedangkan APM terendah adalah kecamatan Talaga Raya. Nilai APK maupun APM terendah untuk jenjang SD/MI dan SLTP/MTs adalah kecamatan Sampolawa. Kemudian untuk jenjang TK/RA nilai APK maupun APM terendah adalah kecamatan Batu Atas (Sumber: Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011).

Terakhir adalah data LPMP Sultra tahun 2011 bahwa pada umumnya sekolah-sekolah pada semua jenjang pendidikan di kabupaten Buton belum terakreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di kabupaten Buton perlu segera dibenahi dari aspek standar mutu pendidikan.

Fakta-fakta tersebut hanyalah sedikit informasi tentang pendidikan di Kabupaten Buton yang belum memenuhi harapan konstitusi tentang pemerataan dan mutu pendidikan. Ibarat fenomena gunung es, tentu masih banyak informasi-informasi penting yang dapat digali tentang pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Buton agar dapat menjadi basis data dalam proses pengambilan keputusan pendidikan di daerah tersebut. Kami berasumsi bahwa kondisi-kondisi tersebut bukanlah gambaran dari pendidikan berkualitas yang diharapkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maupun pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Karena itu, penelitian ini bermaksud menelisik lebih jauh fenomena pendidikan di Kabupaten Buton tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kondisi mutu pendidikan kabupaten Buton tahun 2012 sampai 2016; 2) Bagaimana ketercapaian delapan standar nasional pendidikan di Kabupaten Buton?; 3) Apa saja agenda dan prioritas pengembangan mutu pendidikan di kabupaten Buton?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan memberikan tentang: 1) Kondisi mutu pendidikan kabupaten Buton tahun 2012 sampai 2016; 2) Ketercapaian delapan standar nasional pendidikan di Kabupaten Buton; dan 3) Agenda dan prioritas pengembangan mutu pendidikan di kabupaten Buton?

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Relevan

Penelitian Ahmad Kosasih (2010) tentang “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (Strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru melalui MKKS dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut). Riset ini menemukan bahwa peningkatan kinerja kepala sekolah dan kinerja guru pada tiga SMP di Kabupaten Garut adalah melalui pemberdayaan MKKS dan pemberdayaan MGMP, dalam hal ini MKKS dan MGMP merupakan wadah pembinaan, pusat belajarnya kepala sekolah dan guru, pusat informasi, pusat diklat, seminar, lokakarya, peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, proses pembelajaran serta peningkatan kompetensi lainnya. Sedangkan M. Ali Hasan (2010) tentang “Manajemen Sekolah Bermutu” (Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Organisasi, Komitmen Guru dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Mutu SMP Berkategori Rintisan Sekolah Standar Nasional di Kabupaten Indramayu) menyimpulkan bahwa Perlunya pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, komitmen guru, dan peran serta masyarakat yang berkontribusi terhadap mutu proses pembelajaran dan mutu pendidikan SMP berkategori RSSN di Kabupaten Indramayu. Pemberdayaan faktor-faktor kunci tersebut hendaknya berpijak kepada prinsip-prinsip selalu berfokus kepada pengguna jasa, keterlibatan total semua warga sekolah, ukuran baku mutu pendidikan, memandang pendidikan sebagai sistem dan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas adalah pada keluasan cakupan pengajiannya, di mana keduanya masing-masing meneliti tentang mutu pada sekolah. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada satu wilayah Kabupaten, yang mencakup semua jenjang dan jalur pendidikan di Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara. Di samping itu penelitian ini bermaksud menggambarkan pengembangan mutu pendidikan dalam desain pemerintah Kabupaten, sehingga terlihat lebih kompleks.

Kerangka Teoretik

Arcaro (2006) menyatakan bahwa “mutu adalah sebuah proses struktur untuk memperbaiki keluaran yang di hasilkan”. Sedangkan Sallis (2010) menyatakan bahwa “mutu merupakan sebuah filosofi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan”. Lebih lanjut Depdiknas (2002) menjelaskan bahwa “mutu secara umum di definisikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang di harapkan”. Dengan demikian, mutu dapat dimaknai sebagai filosofi suatu lembaga dalam menghadapi tekanan dari luar dengan cara memperbaiki produk dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan.

Meraih pendidikan bermutu membutuhkan usaha serius dengan memikirkan variabel pendidikan secara komprehensif. Para pemimpin pendidikan mesti mengenali faktor-faktor yang dapat menyebabkan tinggi ataupun rendahnya pendidikan yang diselenggarakan. Soetopo (2005, 94-96) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, yaitu: kepemimpinan yang positif dan kuat, harapan yang tinggi, monitor kemajuan siswa, tanggungjawab siswa dan keterlibatannya di sekolah, insentif dan hadiah, keterlibatan orang tua di sekolah, perencanaan dan pendekatan yang konsisten. Secara spesifik faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu : kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* atau input-input analisis yang tidak *consisten*; 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim (Husaini Usman, 2012).

Ujung tombak dalam rangka menciptakan mutu pendidikan adalah sekolah, sehingga penting menyelenggarakan sekolah yang bermutu pula. Karakteristik sekolah bermutu menurut Arcaro (2006) adalah sebagai berikut:

- a) Fokus pada *costumer*. Dalam meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan sekolah harus melayani kebutuhan kostumer baik internal maupun eksternal.
- b) Keterlibatan total. Semua komponen yang berkepentingan (warga sekolah dan warga masyarakat dan pemerintah) harus terlibat secara langsung dalam pengembangan mutu pendidikan.
- c) Pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan cara evaluasi, evaluasi ini dijadikan acuan dalam meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan. Salah satu bagian yang sering dijadikan instrumen pengukuran adalah nilai prestasi siswa.
- d) Komitmen. Hal lain yang menyangkut pendidikan bermutu adalah adanya komitmen bersama terhadap budaya mutu utamanya komite sekolah dan pemerintah.
- e) Memandang pendidikan sebagai sistem. Pandangan seperti ini akan mengeliminasi pemborosan dari pendidikan dan dapat memperbaiki mutu setiap proses pendidikan.

f) Perbaikan berkelanjutan. Prinsip dasar mutu adalah perbaikan secara terus-menerus (berkelanjutan) langkah ini dilakukan secara konsisten menemukan cara menangani masalah dan membuat perbaikan yang diperlukan.

Menurut Hendiyat Soetopo (1984) dalam Ardiansyah (2011), bahwa ada beberapa komponen yang berhubungan secara langsung dengan keberhasilan mutu sekolah yang meliputi sifat-sifat layanan demi kepuasan pelanggannya yang meliputi: a) Siswa puas dengan layanan sekolah; b) Orang tua siswa puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua; c) Pihak pemakai/penerima lulusan (perguruan tinggi, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas yang sesuai dengan harapan; d) Guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah.

Singkatnya bahwa mutu merupakan tuntutan mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Lebih ditegaskan lagi dengan penetapan standar nasional pendidikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengamanatkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yakni (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan kerangka teoretik tersebut, maka kajian ini berkisar tentang proses pengembangan mutu pendidikan yang mencakup seluruh jalur dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buton dengan menggunakan prinsip-prinsip mutu yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang oleh Burhan Bungin (2005) menganggap masih dipengaruhi cara pandang positivisme. Sumber data penelitian adalah: Bupati dan Wakil Bupati Buton, Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Dikbud Kabupaten Buton, Kepala Sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Buton, dan Tokoh Masyarakat Buton. Beberapa komponen sumber data tersebut dipilih untuk menjadi informan kunci (*key informan*). Pengumpulan data menggunakan teknik: (1) wawancara, (2) pengamatan terlibat, (3) studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yakni: reduksi, display, dan verifikasi. Kredibilitas data diuji dengan menggunakan teknik *member check* dan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Buton

Rasio Siswa dengan Guru

Rasio siswa dengan guru menunjukkan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa yang harus dilayani pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam kurikulum satuan pendidikan ditetapkan bahwa rasio siswa per guru untuk setiap jenjang pendidikan berkisar antara 1:20 sampai dengan 1:24. Semakin rendah rasio siswa/guru semakin berlebihan jumlah guru, sebaliknya semakin tinggi rasio siswa/guru mengindikasikan semakin kekurangan guru.

- Pada jenjang TK/RA rasio siswa per guru yang terendah adalah kecamatan Kapontori dan Mawasangka Timur yaitu 1 : 7, artinya bahwa setiap guru hanya melayani 7 orang siswa, sedangkan yang tertinggi adalah kecamatan Talaga Rayadengan perbandingan 1 : 20, yaitu 1 orang guru melayani 22 siswa (rasio yang ideal). Untuk kecamatan lainnya menunjukkan rasio yang kelebihan guru.
- Pada jenjang SD/MI rasio yang terendah adalah kecamatan Kapontori dengan perbandingan 1 : 18, sedangkan yang tertinggi adalah kecamatan Mawasangka Tengahsetiap guru melayani 103 orang siswa. Rasio yang ideal adalah kecamatan Batauga dan kecamatan Sangia Wambulu dengan rasio 1:22. Rasio yang mengindikasikan kelebihan guru adalah kecamatan Wabula dan kecamatan Kapontori, sedangkan kecamatan lainnya mengindikasikan kekurangan guru.
- Pada jenjang SLTP rasio siswa per guru yang tertinggi adalah kecamatan Talaga Raya yaitu setiap guru melayani 23 siswa, kemudian kecamatan Batu Atas setiap guru melayani 21 siswa. Rasio siswa per guru di kedua kecamatan tersebut merupakan rasio yang ideal. Rasio yang terendah adalah kecamatan Wabula yaitu setiap guru hanya melayani 6 siswa. Selain kecamatan Talaga Raya dan kecamatan Batu Atas mengindikasikan rasio yang kelebihan guru. Hal tersebut jika dilihat berdasarkan total guru (guru PNS tambah Non PNS) yang ada di masing-masing kecamatan. Jika dilihat berdasarkan jumlah guru PNS yang terdapat di masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa rasio yang ideal adalah kecamatan Lasalimu dan kecamatan Mawasangka Timur 1:24, dan kecamatan Siontapina 1:23. Kecamatan yang menunjukkan rasio kekurangan guru PNS adalah kecamatan dengan rasio di atas rasio 1:24, sedangkan kecamatan yang kelebihan guru PNS adalah rasio di bawah 1:20.
- Pada jenjang SLTA rasio yang tertinggi secara total (guru PNS tambah guru Non PNS) adalah kecamatan Talaga Raya yaitu setiap guru melayani 31 siswa, kemudian kecamatan Sampolawa setiap guru melayani 25 siswa. Kedua kecamatan tersebut mengindikasikan adanya kekurangan guru. Rasio yang terendah adalah kecamatan Batu Atas yaitu setiap guru hanya melayani 4 siswa. Jika kecamatan Talaga Raya dan Sampolawa terjadi kekurangan guru, maka kecamatan lainnya di kabupaten Buton menunjukkan adanya kelebihan guru. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan jumlah guru PNS, maka

tampak dari table di atas bahwa sebahagian besar kecamatan di kabupaten Buton (terdapat 13 kecamatan) yang kekurangan guru yaitu kecamatan dengan rasio siswa/guru PNS yang di atas 1:24, dan terdapat 5 kecamatan yang kelebihan guru dengan rasio di bawah 1:20, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio ideal adalah kecamatan Gu 1:21, kecamatan Lakudo 1:20, dan kecamatan Mawasangka 1:22.

- Terjadinya kelebihan guru di beberapa kecamatan dan kekurangan guru di kecamatan lain disebabkan karena distribusi guru bidang studi yang tidak merata, yaitu terdapat kelebihan guru pada bidang studi tertentu, terdapat kekurangan guru pada bidang studi lainnya. Ditinjau dari pembelajaran, kelebihan guru dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih baik, karena beban mengajar guru yang rendah menyebabkan lebih banyak waktu yang digunakan untuk menyiapkan bahan ajar. Namun di sisi lain, jumlah guru yang berlebihan akan berdampak pada kurang efisiennya aspek pendanaan dan tidak terpenuhinya jam wajib yakni 24 jam per minggu terutama bagi guru-guru yang telah disertifikasi.

Rasio Siswa Per Rombongan Belajar (R-S/Rb)

Rasio siswa per rombongan belajar merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah rombongan belajar pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata kepadatan rombongan belajar di suatu sekolah atau daerah tertentu.

- Jenjang TK/RA rasio siswa per rombongan belajar (Sw/Rb) yang terbesar adalah di kecamatan Talaga Raya yaitu 1:29 hampir mencapai rasio ideal 1:30 sampai 1:40, sedangkan rasio yang terendah adalah kecamatan Mawasangka Timur 1:10. Secara keseluruhan Kabupaten Buton rasio rata-rata siswa per rombongan belajar untuk jenjang TK/RA adalah 1:17.
- Pada jenjang pendidikan SD menunjukkan rasio Sw/Rb yang tertinggi terdapat di kecamatan Siompu 1:29, juga hampir mencapai rasio ideal, sedangkan rasio Sw/Rb yang terendah terdapat di kecamatan Kapontori dengan rasio 1:16. Kemudian secara keseluruhan Kabupaten Buton rasio rata-rata Sw/Rb adalah sebesar 1:22.
- Pada jenjang pendidikan SLTP yang tertinggi adalah kecamatan Talaga Raya dengan rasio 1:102, sedangkan yang terendah adalah kecamatan Wabula dengan rasio 1:52. Dengan demikian pada semua kecamatan di Kabupaten Buton tidak satupun yang mencapai atau mendekati rasio ideal. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa pada setiap rombongan belajar untuk jenjang SLTP sangat padat, di mana untuk keseluruhan Kabupaten Buton rasio rata-ratanya sebesar 1:67.
- Pada jenjang SLTA di kabupaten Buton menunjukkan bahwa rasio Sw/Rb yang tertinggi adalah kecamatan Siompu dengan rasio 1:37, hal ini berada dalam rasio ideal yaitu antara 1:30 dan 1:40. Kecamatan lain yang berada dalam rasio ideal adalah kecamatan Siompu Barat 1:33, kecamatan Kadatua 1:32, Kecamatan Kapontori 1:33, dan Kecamatan Gu 1:31, Kecamatan Talaga Raya 1:31.

Kecamatan lainnya mempunyai rasio yang tidak ideal yaitu berada di bawah rasio ideal. Secara keseluruhan untuk Kabupaten Buton pada jenjang SLTA rasio Sw/Rb rata-rata sebesar 1:28, yang berarti hampir mencapai rasio ideal.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa rasio Sw/Rb yang ideal adalah antara 1:30 sampai 1:40. Rasio yang berada di bawah rasio ideal menunjukkan bahwa jumlah kelas terlalu berlebihan jika rasio rombongan belajar dengan ruang kelas < 1 , ruang kelas perlu dioptimalkan jika rasio rombongan belajar dengan ruang kelas $= 1$, potensi untuk regrouping rombongan belajar jika rasio rombongan belajar dengan ruang kelas > 1 . Selanjutnya jika rasio Sw/Rb ideal, tetapi rasio rombongan belajar dengan ruang kelas < 1 , maka ruang kelas perlu dioptimalkan. Kondisi yang paling ideal adalah jika rasio Sw/Rb berada dalam rasio ideal dan rasio rombongan belajar dengan ruang kelas $= 1$. Jika rasio Sw/Rb ideal, tetapi rasio rombongan belajar dengan ruang kelas > 1 , maka ruang kelas masih kurang. Selanjutnya, jika rasio Sw/Rb lebih besar dari rasio ideal, tetapi rasio rombongan belajar dengan ruang kelas < 1 , maka jumlah siswa perlu dikendalikan. Jika rasio Sw/Rb lebih besar dari rasio ideal, tetapi rasio rombongan belajar dengan ruang kelas $= 1$, berarti ruang kelas masih kurang. Jika rasio Sw/Rb lebih besar dari rasio ideal, tetapi rasio rombongan belajar dengan ruang kelas < 1 , berarti ruang kelas sangat kurang. Sehubungan dengan uraian tersebut, tampaknya kondisi rombongan belajar dan ruang kelas masih perlu diperbaiki, karena masih belum mencapai kondisi ideal antara jumlah siswa, rombongan belajar dan ruang kelas.

Pendidikan Nonformal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton perlu berupaya secara terus-menerus untuk mensosialisasikan dan menyelenggarakan berbagai program pendidikan nonformal, seperti program pendidikan anak usia dini (PAUD), program kesetaraan (Paket A, B dan C), program keaksaraan (pemberantasan buta aksara), kelompok belajar usaha, *life skill* (keterampilan) dan sebagainya. Dengan dibukanya berbagai program pendidikan nonformal tersebut maka jumlah masyarakat buta aksara, putus sekolah, dan yang menganggur di kabupaten Buton diharapkan akan semakin berkurang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan non-formal, maka perbaikan dan pengaktifan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap kecamatan.

Ketercapaian Delapan Standar Pendidikan

Standar Isi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan 8 masalah sebagai faktor penyebab rendahnya kompetensi siswa dari aspek standar isi. Terdapat dua faktor penyebab yang merupakan masalah semua sekolah sampel (100%), yaitu faktor penyebab nomor 1 dan 3. Untuk faktor penyebab nomor 1, bahwa para guru tidak membuat sendiri silabus karena masih kurangnya pengetahuan dalam menyusun silabus, sehingga mereka menggunakan cara mudah yaitu dengan cara menyalin atau memfoto copy silabus

sekolah lain dari luar kabupaten Buton. Selanjutnya faktor nomor 3, menurut para guru bahwa hal ini dikarenakan kurangnya waktu mereka untuk membuat tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Masalah utama yang lain dari aspek standar isi adalah faktor penyebab nomor 2. Hal ini merupakan masalah dari 75% sekolah sampel. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, karena kegiatan tersebut membutuhkan waktu ekstra sementara motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut tidak ada.

Faktor lainnya yang menjadi penyebab rendahnya kompetensi siswa dari aspek standar ini adalah faktor nomor 5 yaitu sebanyak 50% sekolah sampel. Bahwa RPP yang disusun oleh guru tidak sesuai dengan karakteristik materi sehingga metode dan model pembelajaran kurang tepat. Hal ini dikarenakan para guru belum menguasai sepenuhnya metode dan model-model pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran.

Standar Proses

Dari aspek standar proses pembelajaran terdapat dua sekolah sampel yang telah mencapai nilai di atas 60, sedangkan dua sekolah sampel lainnya masih di bawah 60. Masih rendahnya standar proses pembelajaran tersebut terutama pada aspek kegiatan inti, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan guru tentang model-model pembelajaran, dan kemampuan membuat media pembelajaran yang masih terbatas, serta sarana pembelajaran yang juga masih terbatas.

Selain beberapa faktor penyebab tersebut di atas, faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya standar proses pembelajaran sekolah sampel di kabupaten Buton adalah karena masih kurang maksimalnya pemantauan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas, sehingga para guru kurang termotivasi dalam meningkatkan pengetahuan mereka mengenai perangkat pembelajaran dan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran maupun karakteristik siswa.

Standar Sarana dan Prasarana

Pada aspek mutu sarana dan prasarana sekolah-sekolah sampel di Kabupaten Buton masih sangat rendah, di mana semua sekolah sampel bernilai di bawah 60. Hal tersebut terlihat pula dari aspek ketersediaan peralatan dan bahan laboratorium, sarana IT, ketercukupan lahan, dan kondisi ventilasi udara. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang sedemikian itu, maka pihak sekolah tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada aspek-aspek lainnya.

Khusus untuk buku perpustakaan sebaiknya dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. Begitu pula dengan buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

Hal yang berkaitan dengan lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.

Standar Pengelolaan

Pada aspek standar pengelolaan, kondisi mutu pendidikan di kabupaten Buton belum memenuhi standar memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh pada umumnya kepala sekolah belum melibatkan pihak-pihak terkait secara maksimal dalam menyusun rencana dan program layanan pendidikan yang ideal. Dengan kondisi tersebut di beberapa sekolah, para guru tidak termotivasi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara efektif.

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini yaitu sebaiknya setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

Standar Pembiayaan

Pada aspek standar pembiayaan ternyata semua sekolah sampel walaupun kriterianya mendapatkan nilai di atas 60, namun dalam hal pembelanjaraan untuk penyediaan sarana belajar masih sangat minim. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran yang diperuntukkan bagi pembiayaan guru honorer, dan kelebihan jam mengajar guru tetap. Hal tersebut berkaitan dengan masih kurangnya guru bidang studi pada beberapa mata pelajaran.

Secara teoretis pembiayaan dalam bidang pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Buton menetapkan standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Standar Kompetensi Lulusan

Bahwa mutu lulusan sekolah-sekolah sampel di Kabupaten Buton sudah berada pada kriteria kelulusan cukup dengan nilai di atas 60. Hal tersebut terlihat dari persentase kelulusan siswa selalu di atas 90 persen. Namun demikian, jika dilihat dari aspek pencapaian kompetensi tertentu pada masing-masing sekolah masih ada yang pencapaiannya di bawah nilai 60. Selain itu itu, mutu lulusan dari aspek kreativitas siswa masih kurang, sehingga masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa, walaupun ada hal itu dilaksanakan secara tidak terjadwal.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada aspek standar tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan nilai yang diperoleh masih di bawah 60. Hal tersebut disebabkan karena masih ada guru yang mengajarkan mata pelajaran yang bukan keahliannya. Keadaan tersebut terjadi karena masih kurangnya tenaga guru untuk mata pelajaran tertentu. Selain itu, guru juga masih merangkap tugas-tugas administrasi, karena sekolah-sekolah sampel tersebut masih kekurangan tenaga administrasi. Selain itu, para guru masih kurang pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan model pembelajaran, karena masih kurang dibekali melalui pendidikan dan latihan. Kemudian faktor lainnya adalah kehadiran guru yang relatif rendah yang disebabkan karena kendala alat transportasi.

Standar Penilaian

Pada umumnya sekolah-sekolah sampel tidak menyediakan informasi kriteria penilaian pada silabus yang disampaikan kepada siswa di awal semester. Selain itu, pihak sekolah tidak/kurang tegas menyampaikan kepada guru mata pelajaran Ujian Nasional tentang kriteria penyusunan alat evaluasi. Hal ini terlihat setiap akhir semester guru dalam memberikan evaluasi hanya menggunakan satu jenis test yaitu essay test. Dengan kondisi tersebut menyebabkan upaya perbaikan melalui alat evaluasi belum dilakukan secara maksimal.

Skala Prioritas Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Buton 2012-2016

Program pengembangan pendidikan selama lima tahun dengan skala prioritas kecamatan sebagaimana pada table di bawah ini. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Skala Prioritas I

- Pada jenjang SLTA mencakup 15 kecamatan, yakni: Lasalimu Selatan, Siontapina, Wabula, Sampolawa, Lapandewa, Batu Atas, Siompu Barat, Sangia Wambulu, Mawasangka, Mawasangka Timur.
- Pada jenjang SLTP mencakup Kecamatan Lasalimu Selatan
- Pada jenjang SD mencakup Kecamatan Sangia Wambulu
- Pada jenjang TK mencakup 7 Kecamatan, yakni: Lasalimu, Wabula, Lapandewa, Batu Atas, Batauga, Siompu, Siompu Barat
- Pendidikan Non-Forma mencakup semua kecamatan

Skala Prioritas II

- Pada jenjang SLTA mencakup 2 kecamatan, yakni: Kadatua dan Gu

- Pada jenjang SLTP mencakup 2 Kecamatan, yakni Mawasangka Timur dan Mawasangka Tengah
- Pada jenjang SD mencakup 4 Kecamatan, yakni: Talaga Raya, Kadatua, Siompu, Lapandewa, dan Lasalimu.
- Pada jenjang TK mencakup 5 Kecamatan, yakni: Wolowa, Gu, Sangi Wambulu, Lakudo, dan Mawangka Tengah

Skala Prioritas III

- Pada jenjang SLTA mencakup 3 Kecamatan, yakni: Batauga, Kopontori, Lakudo
- Pada jenjang SLTP mencakup 12 Kecamatan, yakni: Siantopina, Wabula, Wolowa, Sampolawa, Lapandewa, Batu Atas, Batauga, Kadatua, Siompu Barat, Gu, Sangia Wambulu, Talaga Raya.
- Pada jenjang SD mencakup 3 Kecamatan, yakni: Sampolawa, Batu Atas, dan Gu
- Pada jenjang TK mencakup 5 Kecamatan, yakni: Lasalimu Selatan, Kapontori, Mawasangka, Mawasangka Timur, Talaga Raya

Skala Prioritas IV

- Pada jenjang SLTA mencakup 4 Kecamatan, yakni: Lasalimu, Wolowa, Mawasangka Tengah, Talaga Raya.
- Pada jenjang SLTP mencakup 6 Kecamatan, yakni: Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori, Lakudo, Mawasangka, Siompu.
- Pada jenjang SD mencakup 12 Kecamatan, yakni: Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siontapina, Batauga, Kopontori, Lakuda, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Wolowa, Wabula, Kaponto, Mawasangka.
- Pada jenjang TK mencakup 4 Kecamatan, yakni: Siontapina, Pasarwajo, Sampolawa, Kadatua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi mutu pendidikan di Kabupaten Buton dari tingkat TK, SD, SLTP hingga SLTA masih rendah, sehingga perlu pembenahan sesuai standar mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, dalam memantapkan fungsi pendidikan maka Pemerintah Kabupaten Buton perlu meningkatkan mutu pelayanan yang diarahkan pada: a. Pendidikan prasekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b. Pendidikan wajib belajar pendidikan dasar; c. Peningkatan, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah; d. Peningkatan mutu tenaga pendidikan; e. Pembinaan dan peningkatan pendidikan budaya sekolah; f. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.
2. Ketercapaian Delapan Standar Nasional Pendidikan SNP di Kabupaten Buton dapat dilihat dari: a) rendahnya kompetensi siswa dari aspek standar isi; b) rendahnya standar proses pembelajaran sekolah; c) Pada aspek mutu sarana dan prasarana sekolah-sekolah sampel di Kabupaten Buton masih sangat rendah, di mana semua sekolah sampel bernilai di bawah 60; d) Pada aspek standar pengelolaan,

kondisi mutu pendidikan di kabupaten Buton belum memenuhi standar memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal; e) Pada aspek standar pembiayaan ternyata semua sekolah sampel walaupun kriterianya mendapatkan nilai di atas 60; f) Bahwa mutu lulusan sekolah-sekolah sampel di Kabupaten Buton sudah berada pada kriteria kelulusan cukup dengan nilai di atas 60; g) Pada aspek standar tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan nilai yang diperoleh masih di bawah 60; h) Pada umumnya sekolah-sekolah sampel tidak menyediakan informasi kriteria penilaian pada silabus yang disampaikan kepada siswa di awal semester.

3. Agenda prioritas pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Buton dilaksanakan dalam empat tahap, yakni tahap I, II, III, dan IV, yang mencakup pengembangan pada semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan non-formal pada semua Kecamatan, dengan melihat tingkat urgensinya. Pentahapan ini juga menunjukkan fokus pemerintah Kabupaten Buton dalam pengembangan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jerome S. 2006. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara. 2011. *Analisis Biaya Operasional Pendidikan dalam Rangka Program Sekolah Gratis di Sulawesi Tenggara*. Kendari
- Hasan, M. Ali. 2010. *Manajemen Sekolah Bermutu (Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Organisasi, Komitmen Guru dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Mutu SMP Berkategori Rintisan Sekolah Standar Nasional di Kabupaten Indramayu*
- Kosasih, Ahmad. 2010. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (Strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru melalui MKKS dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut*.
- LPMP. 2011. *Data Propinsi Sulawesi Tenggara: Jumlah Individu (Real) Berbasis Kabupaten/Kota dan Tingkat Sekolah: Jumlah Individu Untuk Sekolah Negeri dan Swasta*. Kendari
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Sallis, Edward. 2010. *Total Quality Management In Education (Manajemen Mutu Pendidikan)*. Cet. XI, Yogyakarta: Ircisod
- Soetopo, Hendiyat. 2005. *Pendidikan dan Pembelajaran*. Cet. I, Malang: UMM Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Usman, Husaini. 2012. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Edisi IV, Jakarta: Bumi Aksara

Internet:

- M. Asrori Ardiansyah, M.Pd, <http://makalahtentang.wordpress.com/2011/04/07/hakikat-sekolah-yang-bermutu/>, diakses 22 Mei 2014